

Kontrak Kerja Sama Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Senior Lawyer

***Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)
Law Firm***

**Direktorat Jenderal APTIKA
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI**

SANTIKA PREMIER, 15 Juli 2022

PEMBAHASAN

IN TE
GRI TY

1

**DASAR
PENYUSUNAN
KONTRAK**

2

**EVALUASI DAN
MONITORING
KONTRAK**

3

**PENANGANAN
MASALAH DALAM
KONTRAK PASCA
PENGESAHAN**



1| DASAR PENYUSUNAN KONTRAK

KONTRAK

Pasal 1313 KUH Perdata:

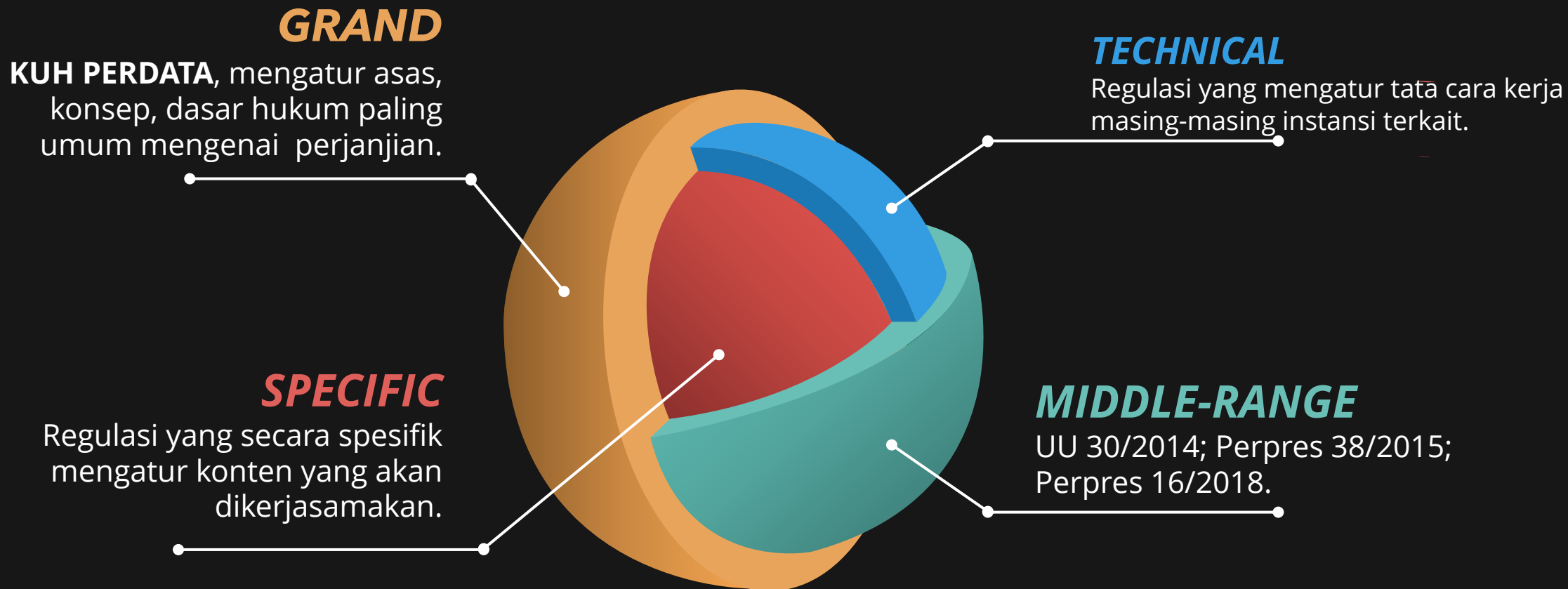
"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

G to B:

1. PPP/KPBU.
2. Pengadaan Barang/Jasa.
3. Hibah.

G to G:

1. MoU antar K/L.
2. PPPK.



Syarat Sah Perjanjian

1. Kesepakatan.
2. Kecakapan Hukum.
3. Objek Tertentu.
4. Klausa yang Halal.

Pasal 1320 KUH Perdata



Anatomi Kontrak

Key Terms

Maksud dan tujuan

Objek Perjanjian

Mulai berlaku dan jangka waktu

Biaya jasa

Tata Cara Pembayaran Biaya Jasa

Hak dan Kewajiban

Tanggung Jawab

Pengakhiran Perjanjian

Boilerplate Clauses

Keadaan Memaksa

Pemberitahuan

Kerahasiaan

Keseluruhan Perjanjian

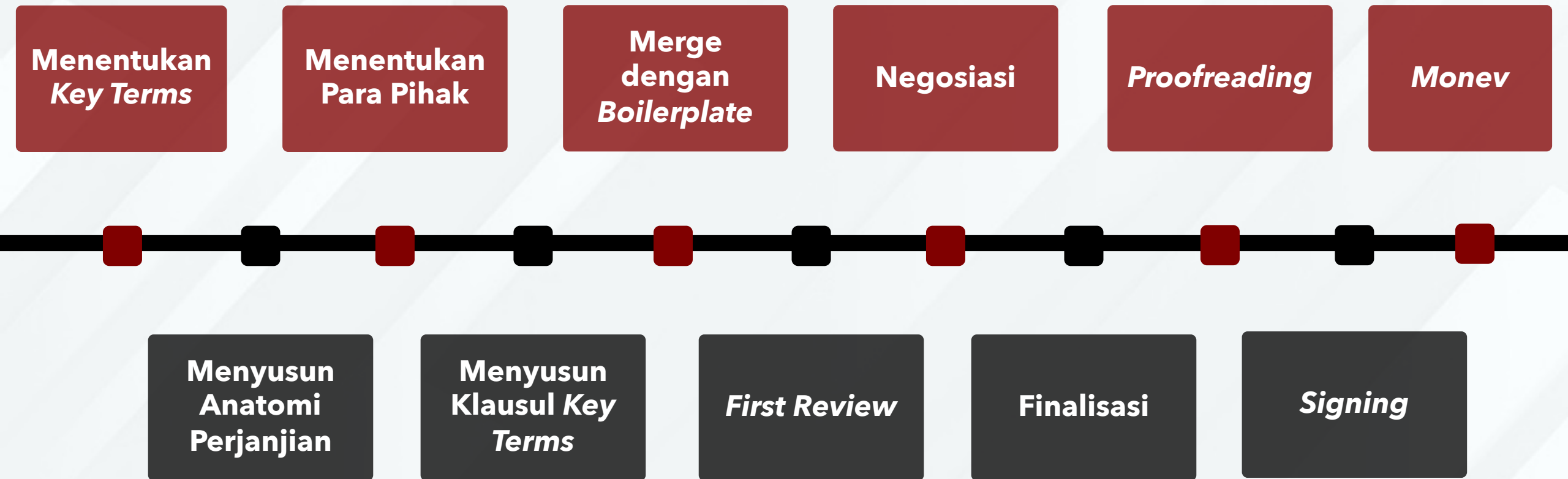
Hukum yang Mengatur

Penyelesaian Perselisihan

Severability

Counterparts

Merancang Kontrak





2| EVALUASI DAN MONITORING



1. SUBJECT; 2. METHODOLOGY.

SUBJEK

Komposisi anggota tim beserta kapabilitasnya dalam melakukan evaluasi dan monitoring perjanjian kerja sama.

- a) Kualifikasi Personal;
- b) Susunan Tim.



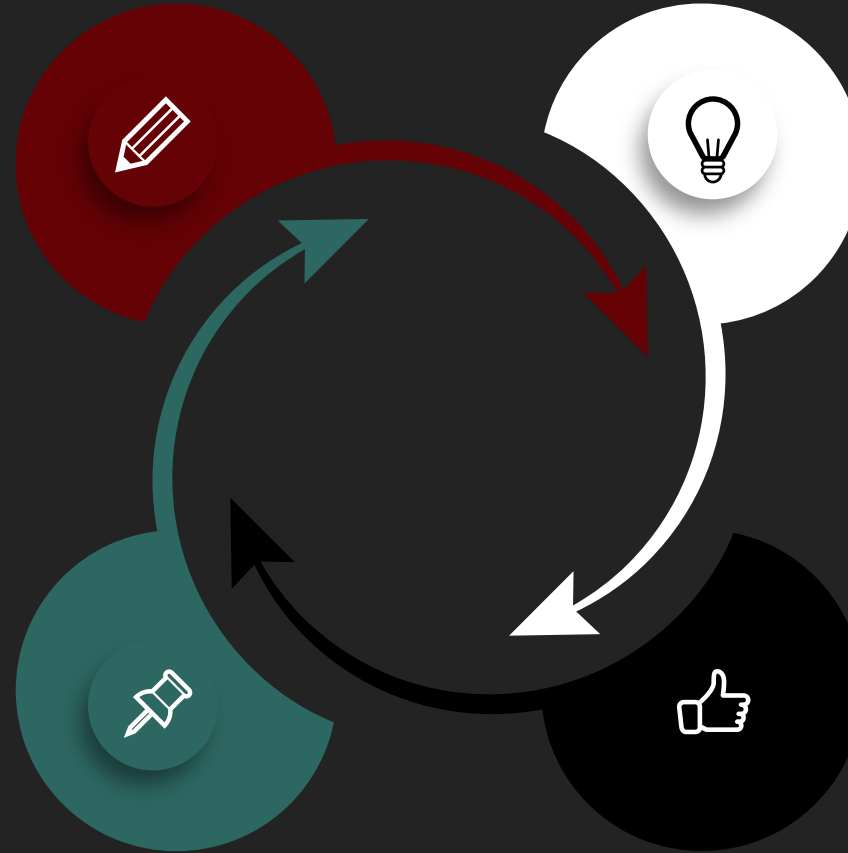
METODE:

REVIEW DOKUMEN

Pemeriksaan langsung terhadap naskah perjanjian dan lampirannya antara pemerintah dengan swasta.

KUISIONER

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak secara umum guna mendapatkan kejelasan atau gambaran umum atas materi kerja sama yang akan di review.



OBSERVASI

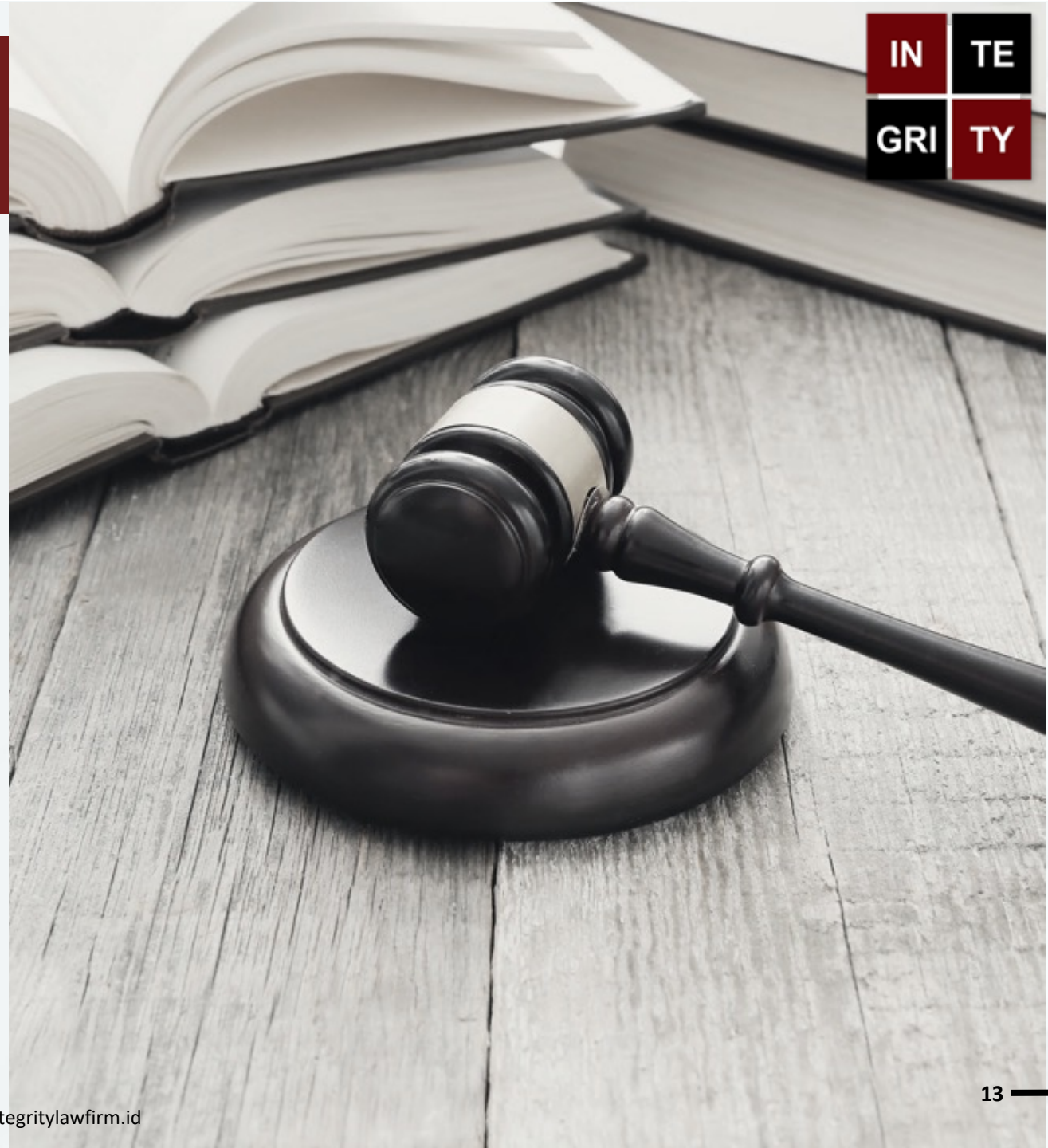
Melakukan pengamatan langsung terhadap produk hasil kerja sama guna mendapatkan fakta visual.

WAWANCARA

Mengajukan beberapa pertanyaan secara dialog terhadap subjek-subjek terkait guna mendapatkan kejelasan atas materi kerja sama yang akan di review.

PARAMETER

- 1. Compliance;***
- 2. Economic Value Added;***
- 3. Management Discretion.***



COMPLIANCE:

- a) Memenuhi syarat minimal perjanjian;
- b) Para pihak dalam perjanjian;
- c) Legalitas pihak swasta;
- d) Kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra;
- e) Kesesuaian prosedur;
- f) Kesesuaian dengan kontrak-kontrak terkait;
- g) Pertimbangan hukum;
- h) Ketertiban umum, kesusilaan, kesopanan, dsb;
- i) Kelayakan jangka waktu;
- j) Kelayakan hak dan kewajiban;
- k) COI;
- l) Perpajakan, PNBP, dsb.



ECONOMIC VALUE ADDED:

- a) Biaya investasi;
- b) Manfaat ekonomi atau sosial bagi masyarakat;
- c) Manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya investasi dari perjanjian yang dibuat;
- d) Kesesuaian perhitungan manfaat ekonomi dengan kondisi nyata pelaksanaan perjanjian;
- e) Kontribusi pihak ketiga;
- f) Besaran bagi hasil;
- g) Kelayakan tarif;
- h) Dsb.

MANAGEMENT DISCRETION:

- a) Tidak mungkin dikerjakan oleh Pemerintah sendiri;
- b) Lebih menguntungkan jika dikelola oleh swasta;
- c) Pemerintah lebih mudah mengendalikan apabila dikelola oleh swasta;
- d) Dsb.



SCORING AND REPORT

Scoring:

Penilaian atas capaian parameter dalam perjanjian kerja sama yang diperiksa.

NILAI	PREDIKAT
< 50	Grade E
50 < sd < 60	Grade D
60 < sd < 75	Grade C
75 < sd < 90	Grade B
90 < sd < 100	Grade A

Report:

*Penyusunan laporan
serta rekomendasi.*



3| PENANGANAN MASALAH PASCA PENGESAHAN

Kesalahan Umum

1. Uji tuntas tidak memadai.
2. Menggunakan istilah yang tidak konsisten.
3. Tidak memaksimalkan fitur *Ms. Word*.
4. Kurang waktu *review*.
5. Konsultan external 100% sempurna.
6. Terminologi yang ambigu/multitafsir.
7. Kesalahan menentukan pihak.
8. Tidak mencantumkan *choice of forum*.
9. Dsb.



Backdated!

1. Perjanjian *backdated* berpotensi dapat dibatalkan.
2. Lebih baik buat klausul retro-aktif.
3. *Counterparts-clause* sebagai solusi.

WANPRESTASI

- 1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;**
- 2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;**
- 3. Membayar ganti rugi;**
- 4. Membatalkan perjanjian; atau**
- 5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.**

PERSELISIHAN

1. RENEGOSIASI 2. LITIGASI



IN **TE**
GRI **TY**



We are the **INTEGRITY**



<http://www.integritylawfirm.id>

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yustus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STIR - Jember

SESI III
Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Puteis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMGATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- DogeNote Buku dari Pematani

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Pidana Korupsi Internal Korporasi
2. Memahami Tidak Pidana Pencurian Uang Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencurian Uang Internal Korporasi
2. Memahami Peja dan Pema Tidak Pidana Korporasi
3. Memahami Pengecekan Berkeadilan

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance Bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Menegakkan Pencegahan dan Pengawasan melalui Sistem Manajemen Anti Pencusian (SMAP)
3. Mengaplikasikan Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS (G) 2762 (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: Isu dan batasan pemberian kepada public official
2. Strategi mengahatkan public official yang meminta uang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMD dan Anak Perusahaan BUMD
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMD dan Anak Perusahaan BUMD
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi (Materi & Sertifikat 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
8815000209
KCS PO INDIAT WIT INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi
Faisal H. Basri, S.E., M.A.

MODERATOR
Kamila, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Ketua Mahkamah RI

Yudi Latief
Ketua PKM Indonesia

Arul Sami
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Basri Basrah
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Yudi Latief
Ketua PKM Indonesia

Deny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2

Tersedia e-certificate

Kamila, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Deny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Sudari
Pengasah Kemitraan dan Pro-Sosialisasi Masyarakat Berkeadilan

Rully Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Moh. Basri Basrah
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Titi Angraini
Dosen Pendidikan Matematika

Tim Lindsey
Professor International Law School Australia

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Tersedia e-certificate

Agustus 12 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Felly Shousa 08173006471027

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

